



Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan Tanggapi Raperda RPJMD 2025-2045

Dorong Pemkot Negosiasi Peroleh Tanah Kasultanan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2045 mulai dibahas DPRD Kota Jogja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja. Materi pembahasan masih bersifat penajakan.



KRISNADI SETYAWAN
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja

Saya mendorong Pemkot Jogja berani bernegosiasi guna mendapatkan kompensasi tanah kasultanan di wilayah aglomerasi atau dalam ringroad sebagai penyangga kawasan strategis.

"KAMI koordinasi membahas rancangan awal RPJMD," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan kemarin (30/1). Koordinasi diikuti pimpinan dan anggota Komisi D. Krisnadi memandu jalannya rapat koordinasi yang dihadiri Kepala Bappeda Kota Jogja Agus Tri Haryono. Banyak hal menyangkut perencanaan pembangunan Kota Jogja dibahas. Dalam kesempatan itu, Krisnadi meminta penjelasan soal pondasi pembangunan menyangkut alas hak. "Contohnya dengan asumsi penambahan jumlah penduduk. Bagaimana dengan kebutuhan infrastruktur dan keterbatasan lahan," ujar Krisnadi di depan rapat kerja yang berlangsung Rabu (10/1) lalu.

Dia juga menanyakan soal langkah pemkot apakah sudah memasukan status hak guna bangunan (HGB) *Sultanaat Grand* (SG) atau tanah kasultanan dalam pembangunan rumah susun (rusun) yang dibangun pemkot maupun pihak swasta.

Krisnadi mempertanyakan pengembangan aglomerasi Kota Jogja yang dibatasi sampai dengan ringroad atau jalan lingkar. Diingat, kawasan Kota Jogja sudah terpotong dengan kawasan keraton. Dia memberikan ilustrasi seperti pemindahan sejumlah warga di kawasan benteng keraton. "Warga dapat ganti rugi. Tapi apakah itu dapat dinegosiasikan," ujarnya setengah bertanya.

Lebih jauh diingatkan, pengembangan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang memindahkan warga harus terkonsep secara terpadu. Misalnya mereka yang tinggal di *njeron beteng* atau di kawasan benteng keraton.

Menurut Krisnadi kalau warga harus pindah karena pertimbangan adanya revitalisasi benteng, sebaiknya jangan asal memberikan *bebungah* atau semacam pesangon. Pemkot perlu memikitkan mereka agar direlokasi di lahan yang terpadu. "Baik hunian maupun infrastrukturnya," pintanya. Dia pun mewanti-wanti agar pengembangan *world heritage* di Kota Jogja bisa memperoleh kompensasi lahan tanah kasultanan di wilayah aglomerasi.

"Saya mendorong Pemkot Jogja berani bernegosiasi guna mendapatkan kompensasi tanah kasultanan di wilayah aglomerasi atau dalam ringroad sebagai penyangga kawasan strategis," desak wakil rakyat yang tinggal di bilangan Rotowijayan ini. Kepala Bappeda Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan, berencana mengadakan konsolidasi lahan terlebih dulu. Agus mencontohkan proyek M3K dan proyek Mahanani yang dibiayai dengan dana keistimewaan (danais). Dijelaskan kawasan Sungai Winongo merupakan satuan kawasan strategis keistimewaan. Sejalan dengan itu bangunan gedung RW 1 Terban, Gondokusuman, bakal ditata ulang.

Diakui, ke depan bakal terjadi lonjakan pembangunan di Kota Jogja. Namun demikian, terjadi kendala berupa terbatasnya lahan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik. Untuk rumah hunian mengalami kendala terbatasnya lahan.

Pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten atau *Pakualamanaan Grand* (PAG) hanya bisa dilakukan dengan sistem sewa. Begitu pula pembangunan susun sederhana sewa (rusunawa). Tanah yang digunakan juga dengan sistem sewa. "Ke depan pembangunan Jogja ke barat dan ke selatan," terang Agus.

Krisnadi yang bertindak sebagai pimpinan rapat kemudian memutuskan dilanjutkan kembali pada Juli 2024. "Pembahasan cukup sampai di sini dulu," ucapnya sesaat sebelum mengakhiri jalannya rapat kerja. (kus/by)

HARUS PINDAH: Sejumlah rumah warga yang berada di kawasan Njeron Beteng dibongkar. Ini menyusul adanya revitalisasi benteng keraton. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan ingin warga direlokasi di lahan yang terpadu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005